

## **Daftar Pustaka**

### **Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penghasilan atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan

Sistem dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/KMK.01/2021 tentang Program Sinergi

Reformasi dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 667/KMK.1/2022 tentang Perubahan atas

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/KMK.01/2021 tentang Program

Sinergi Reformasi dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2014 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan

Pengaduan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2017 tentang Tata Cara

Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan dalam Rangka

Melaksanakan Perjanjian Internasional.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara Spontan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2017 tentang Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan Terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2019 tentang Pengelolaan Informasi Keuangan secara Otomatis dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Informasi secara Spontan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2020 tentang Tata Cara Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Penjaminan Kualitas Data dalam Rangka Perluasan Basis Data.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1/PJ/2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

### **Lainnya**

Achim, Monica Violeta & Borlea, Sorin Nicholas. (2020). *Economic and Financial Crime: Corruption, Shadow Economy, and Money Laundering*.

Anditya, Anugrah. (Februari 2018). “Pemilihan Konsep Peraturan Perpajakan untuk Menanggulangi Dampak Asynchronous Information dalam Transaksi Elektronik di Indonesia”. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 30, No. 1, hlm. 33-47.

- Anonim. (14 Februari 2022). “HMRC Seizes NFT for First Time in £1.4m Fraud Case”. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/business-60369879>.
- Buehn, Andreas & Schneider, Friedrich. (2013). *Estimating the Size of the Shadow Economy: Methods, Problems and Open Questions*. Johannes Kepler University of Linz (Department of Economics, Austria). <http://www.Economics.jku.at/papers/2013/wp1320.pdf>.
- Cohen, Moris L. & Olson, Kent C. (1992). *Legal Research*. West Publishing, Co., Minnesota.
- Community, Digitals. <https://digitalscommunity.co.id/news/wedeals-e-commerce-yang-terkoneksi-dengan-teknologi-blockchain/>.
- Damuri, Yose Rizal; Fauri, Adinova; & Rafitrandi, Dandy. (2020). *Perkembangan dan Regulasi E-commerce di Indonesia*, hlm.2. CSIS Policy Brief, Jakarta.
- Horiachko, Andri. (28 Juni 2023). *Using Blockchain in E-commerce in 2023: Pros and Cons*. <https://www.softermii.com/blog/using-blockchain-in-e-commerce-pros-and-cons>.
- Houben, Robby & Snyers, Alexander. (2018). *Cryptocurrencies and Blockchain: Legal Context and Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion*. European Union, Brussels.
- Irianto, Edi Slamet. (2014). *Pengantar Politik Pajak*. Ortax, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng. (2006). *Politik Hukum* [Kumpulan Materi Kuliah]. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Istanto, F. Sugeng. (2007). *Penelitian Hukum*. CV Ganda, Yogyakarta.

- Kadir, Muhammad Abdul. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lantz, Lorne & Cawrey, Daniel. (2021). *Mastering Blockchain*, hlm. 1. O'Reilly Media, Inc., California.
- Latif, Abdul & Ali, Hasbi. (2019). *Politik Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maulani, Atiqoh Farhah. (April 2021). "Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia". *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 4, hlm. 1333-1356.
- Mertokusumo, Soedikno. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Nugroho, Rosseno Aji. (2024). *PPATK Ungkap Pencucian Uang Lewat Kripto Sebesar Rp 800 Miliar!*. CNBC Indonesia, Jakarta. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240419105454-4-531615/ppatk-ungkap-pencucian-uang-lewat-kripto-sebesar-rp-800-miliar>
- OECD. (2014). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy- OECD/ G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. OECD Publishing.
- Office, Australia Taxation. <https://www.AustralianTaxationOffice.gov.au/General/Gen/AUSTRALIANTRANSACTIONREPORTSANDANALYSISCENTRE-transaction-report-information-17-June-2021-to-30-June-2027-data-matching-program-protocol/>.
- Pajak, Direktorat Jenderal. (November 2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024* [Publikasi], hlm. 65. <https://www.>



[pajak.go.id/sites/default/files/2020-11/Buku%20Renstra%20DJP%2020-2024%20Released.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2020-11/Buku%20Renstra%20DJP%2020-2024%20Released.pdf).

Pajak, Direktorat Jenderal. (Maret 2022). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021* [Publikasi]. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2022-03/Laporan%20Kinerja%20DJP%20Tahun%202021.pdf>.

Pajak, Direktorat Jenderal. (November 2022). *Laporan Tahunan 2021* [Publikasi]. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2022-11/Laporan%20Tahunan%20DJP%202021%20-%20Bahasa.pdf>.

Pajak, Direktorat Jenderal. (Februari 2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022* [Publikasi]. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2023-02/Laporan%20Kinerja%20DJP%202022.pdf>.

Pajak, Direktorat Jenderal. (Desember 2023). *Laporan Tahunan Tahun 2022* [Publikasi]. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2023-12/Laporan%20Tahunan%20DJP%202022%20-%20Bahasa.pdf>.

Pajak, Direktorat Jenderal. (20 Februari 2024). *PPN PMSE Terkini: 163 Pemungut dan Rp 17,46 Triliun Hasil Pungutan* [Siaran Pers]. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/ppn-pmse-terkini-163-pemungut-dan-rp1746-triliun-hasil-pungutan>.

Pajak, Direktorat Jenderal. (Mei 2024). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023* [Publikasi]. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2024-05/Laporan%20Kinerja%20Direktorat%20Jenderal%20Pajak%20Tahun%202023.pdf>.

- Prasetyo, Dita Karisma. (2019). *Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Investasi Cryptocurrency di Indonesia Ditinjau dari Asas Kemudahan Administrasi* [Skripsi]. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- PwC. (2028). “*the Building Blocks: Overview of Blockchain and Its Maturity*”.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2022). “*Implementation of Blockchain in Minimizing Tax Avoidance of Cryptocurrency Transaction in Indonesia*”. *International Journal of Research and Applied Technology*, Vol. 2, No. 1, hlm. 30-43.
- Ramli, Rully R. & Djumena, Erlangga. (18 Januari 2024). *Nilai Transaksi E-commerce Sepanjang 2023 Turun Jadi 453,75 Triliun*.  
<https://money.kompas.com/read/2024/01/18/121000526/nilai-transaksi-e-commerce-sepanjang-2023-turun-jadi-rp-45375-triliun>.
- Redaksi, Tim. (2017). “Menimbang Manfaat dan Risiko *Blockchain*”. *Probank*, Vol. XXXIV, No. 127.
- Redaksi, Tim. (2017). “*Blockchain* yang Menyita Perhatian”. *Probank*, Vol. XXXIV, No. 127.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. (2010). *Buku VII (Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial) Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Russell, Barrie. (2010). *Revenue Administration: Managing the Shadow Economy*. International Monetary Fund, Washington D.C.

- Schneider, Friedrich & Enste, Dominik H. (Ed). (2013). *The Shadow Economy; An Internal Survey (2<sup>nd</sup> Edition)*, hlm. 8. Cambridge University Press, Cambridge.
- Schön, Wolfgang. (24 April 2018). *Taxation and Democracy* [Bahan Kuliah]. New York University School of Law, New York. [https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload\\_documents/Taxation%20and%20Democracy%20-%20Sch%C3%B6n.pdf](https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Taxation%20and%20Democracy%20-%20Sch%C3%B6n.pdf).
- Siregar, Bustanul. (2019). “Mengingat Lagi Pasal 35A yang Terlupakan”. Dalam Darussalam, *et. al.*, *Seri Kontribusi DDTC: Gagasan dan Pemikiran Sektor Perpajakan 2018/2019*, hlm. 64-67. PT Dimensi International Tax, Jakarta. <https://ddtc.co.id/research/publications/books/seri-kontribusi-ddtc-gagasan-dan-pemikiran-sektor-perpajakan-2018-2019/>.
- Smith, Stephen. (2015). *Taxation: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, Inggris.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum (Cet.3)*. UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro. (1999). *Metode Penelitian Hukum dan Jumimetri*. Balai Aksara, Yogyakarta.
- Sugiharto, Alexander & Musa, Muhammad Yusuf. (2020). *Blockchain & Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dunia*.

Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study for  
Crypto Asset and Blockchain, Jakarta.

Sulaiman, M. Farouq. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Penamedia Group,  
Jakarta.

Tjokrosetio, Douglas. (2022). *The Complete Guide to Blockchain*. Pusat Data dan  
Analisa Tempo, Jakarta.

Tucker, Catherine. (2019). “*Introduction: Blockchain and the Data Integrity  
Revolution*”. Dalam Anonim, *Blockchain: Insights You Need from  
Harvard Business Review*. Harvard Business Review Press, Boston.

Wells, Joseph T., et. al. (2021). “*Tracing Illicit Transactions: Locating Hidden  
Assets*”. *Fraud Examiners Manual*, edisi 2021. Association of Certified  
Fraud Examiners Inc., Texas.

Wildan, Muhammad. (15 Oktober 2021). *Evaluasi Pelaksanaan PPN PMSE, Ini  
Catatan Komwasjak*. [https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/evaluasi-  
pelaksanaan-ppn-pmse,-ini-catatan-komwasjak](https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/evaluasi-pelaksanaan-ppn-pmse,-ini-catatan-komwasjak).